

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ASET UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Sulaeman^{1*}, Idang Nurodin², Elin Yuniarti³

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jl. R. Syamsudin,
SH No 50, 43113

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jl. R. Syamsudin,
SH No 50, 43113

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jl. R. Syamsudin,
SH No 50, 43113

*sulaeman1342@ummi.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip universitas yang baik tata kelola dalam mengelola aset Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Desain/Metode/Pendekatan: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan studi kasus.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset Universitas Muhammadiyah Sukabumi tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip good university governance. Beberapa masalah yang teridentifikasi antara lain kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset, kurangnya koordinasi antar unit, dan kurangnya perencanaan yang tepat. Rekomendasi yang diberikan termasuk meningkatkan transparansi dalam manajemen aset, meningkatkan koordinasi antara unit, dan meningkatkan perencanaan yang tepat dalam mengelola aset Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Kata Kunci: Good University Governance, Manajemen Aset Perguruan Tinggi, Transparansi, Efisiensi, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi merupakan sebuah lembaga yang mencatat generasi muda yang berkualitas (Remaja & Gede, 2017). Hal ini karena, perguruan tinggi mengikuti perkembangan yang ada dalam ranah ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi (Fitriyani, 2018). Oleh karena itu, Perguruan Tinggi yang menutup diri dan tidak kritis akan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sedikit demi sedikit akan tergilas oleh waktu, dan alhasil tidak bisa melaksanakan tugasnya untuk mencetak generasi muda yang berkualitas dan kompetitif (Remaja & Gede, 2017). Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Perguruan Tinggi, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015).

Penyelenggaraan perguruan tinggi yang efektif dan efisien sangat memerlukan sarana dan prasarana yang mencukupi. Untuk mengakomodasi pengelolaan aset perguruan tinggi secara efisien dan efektif serta membangun transparansi kebijakan pengelolaan aset perguruan tinggi, maka pihak perguruan tinggi perlu memiliki dasar *good university governance* sebagai dasar untuk keberhasilan pengelolaan aset milik perguruan tinggi (Setiabudhi, 2019). Pada saat ini, pengelolaan aset dalam perguruan tinggi itu sangat penting hal ini karena bisa menyimpan detail data pengelolaan aset setiap perubahan yang dilakukan. namun hal ini terkadang aset perguruan tinggi mudah diketahui datanya, disebabkan tidak adanya pengelolaan aset yang baik sehingga data tersebut merugikan pihak perguruan tinggi dan dapat dipastikan bahwa keamanan aset dapat dipantau dengan mudah oleh pihak lain.

GUG (Good University Governance) yaitu suatu konsep yang muncul karena kesadaran bahwa pengelolaan pendidikan tinggi dan institusi perguruan tinggi tidak dapat disetarakan dengan sebuah pengelolaan negara atau korporasi. Yang membedakannya yaitu nilai-nilai luhur pendidikan yang harus dijaga dalam pelaksanaannya (Rahayu & Wahab, 2013). Oleh karena itu, prinsip *Good University Governance* tidak jauh berbeda dengan *good corporate governance* yaitu diantaranya Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Fairness, Penjaminan Mutu Dan Relevansi, Efektivitas Dan Efisiensi, Dan Nirlaba. Transparansi, dibutuhkan supaya perguruan tinggi terbebas dari conflict of interest. (Putra & Roni, 2021).

Implementasi *GUG (Good University Governance)* mengacu pada implementasi *good*

governance menurut Agency Theory. Oleh karena itu, Implementasi *good governance* muncul sebagai bentuk usaha untuk meminimalisir perbedaan kepentingan antara pemilik (principal) dengan manajemen (agent) yang pertama kali dimajukan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. (Wahyudin dkk, 2017). Karena kesuksesan suatu Perguruan Tinggi berpusat pada kontribusi berbagai pihak yang berkepentingan. (Widyaningsih, 2020). Oleh sebab itu, perguruan Tinggi mengetahui tentang pentingnya *good university governance*. Dengan demikian, wujud dari pertanggung jawaban ini muncul dalam bentuk pengelolaan aset Perguruan Tinggi dengan memperlihatkan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan. (Zeyn, 2011).

Kondisi-kondisi tersebut di atas memicu tidak terlaksanakannya asas perguruan tinggi yang baik terkait dengan pengelolaan aset Universitas Muhammadiyah Sukabumi sehingga perlu adanya kajian mengenai pengelolaan aset dalam perspektif *Good University Governance*. Berdasarkan uraian yang ada maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengelolaan aset Universitas Muhammadiyah Sukabumi saat ini?
2. Apa saja prinsip-prinsip *good university governance* yang harus diimplementasikan dalam pengelolaan aset Universitas Muhammadiyah Sukabumi?
3. Bagaimana cara mengimplementasikan prinsip-prinsip *good university governance* dalam pengelolaan aset Universitas Muhammadiyah Sukabumi?
4. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi prinsip-prinsip *good university governance* dalam pengelolaan aset Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan bagaimana cara mengatasinya?

KAJIAN LITERATUR

Landasan Teori

Konsep *Good University Governance*

Konsep *good university governance* dapat dijabarkan sebagai serangkaian mekanisme untuk memusatkan dan mengarahkan suatu universitas agar operasional universitas bergerak sesuai dengan keinginan semua kalangan yang berkepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, *Good University Governance* dapat diketahui sebagai struktur, sistem, dan proses yang dipakai oleh organ-organ universitas karena untuk memiliki nilai tambah universitas secara berkelanjutan dalam jangka panjang. (Putra & Roni 2021). *Governance* kerap kali dijabarkan sebagai proses pengambilan keputusan dan cara dimana keputusan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (World Bank, 1989). maka, konsep *governance* dapat dipakai dalam sejumlah

konteks seperti perusahaan internasional, pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal. Maka dari itu, Selama “governance” merupakan cara pengambilan keputusan dan cara dimana keputusan itu dapat dilaksanakan (Kharisma, 2014).

Prinsip-prinsip Good University Governance

Menurut World Bank dan United Nation Development Program (UNDP) (Yuliono, 2019) beberapa penerapan karakteristik atau prinsip-prinsip good governance, menyakup:

- a) *Participation*. kesertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung dengan lembaga perwakilan yang bisa menyalurkan aspirasinya. Oleh karena itu, Partisipasi itu dimajukan atas dasar kedaulatan berasosiasi dan bermusyawarah serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b) *Rule of law*. uraian hukum yang adil dan dijalankan dengan tidak pandangbulu.
- c) *Transparency*. dimajukan atas dasar kebebasan mendapat informasi.
- d) *Responsiveness*. Lembaga publik harus peka dalam menghadapi stakeholder.
- e) *Consensus orientation*. Berorientasi pada keinginan masyarakat yang lebih luas.
- f) *Equity*. Untuk Setiap masyarakat mempunyai harapan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan.
- g) *Efficiency and Effectiveness*. penanganan sumber daya publik dikerjakan secara cepat dan cermat (efisien) dan keberhasilan (efektif)
- h) *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik untuk setiap aktivitas yang dikerjakan.
- i) *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat perlu mempunyai visi yang berguna untuk kedepannya.

Pengertian dan Fungsi Good University Governance

Good University Governance (GUG) adalah petunjuk atau instruktur yang dipakai untuk mengeluarkan petunjuk bagi pengelola karena dalam rangka untuk mengurus manajemen perguruan tinggi dengan mengamati keperluan pemangku kepentingan (shaula, 2022). Menurut Wijatno (2009:126) (puspitarini, 2012) *Good University Governance (GUG)* dapat dilihat sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip dasar konsep “good governance” dalam sistem dan proses *governance* pada perguruan tinggi melalui berbagai orientasi yang digunakan pad nilai-nilai yang harus didukung tinggi dalam pelaksanaan perguruan tinggi secara individual dan pendidikan secara umum.oleh karena itu, *Good University Governance* adalah petunjuk struktur organisasi untuk menghasilkan tujuan dengan melihat prinsip-prinsip *good university*

governance(GUG). Tujuan/fungsi dari *good university governance* yaitu untuk mencetak perguruan tinggi yang akuntabel. Maka, tujuan pertama pemerintah dalam implementasi konsep *good university governance (GUG)* yaitu dengan mewujudkan satuan kerja yang mengaplikasikan pola tata kelola keuangan badan layanan umum. Satuan Kerja Badan Layanan Umum adalah satuan kerja yang fokus pada penyampaian yang terbaik untuk public (Suriyani,2021).

Konsep Pengelolaan Aset

Konsep pengelolaan aset publik, infrastruktur, dan fasilitas dalam suatu wilayah yaitu upaya untuk membentuk reputasi, akan tetapi bagi negara berkembang seperti Indonesia, keterikatan sumber daya selalu membuat gangguan utama bagi pengelolaan wilayah (Megawati, 2019). Oleh karena itu, Tujuan dari pengembangan sistem aset ini adalah untuk mewujudkan suatu sistem informasi pengelolaan aset yang memiliki fitur utama pencatatan, pelacakan dan pelaporan aset serta memverifikasi unjuk kerjanya (Supriyono, 2017).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset (Simamora , 2015) Yaitu :

1. Sumber Daya Manusia (SDM): Pengetahuan Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi
2. Bukti Kepemilikan: Aset-aset pemekaran perguruan tinggi
3. Penilaian aset perguruan tinggi
4. Komitmen pemimpin
5. Sikap: Rasa Tangung jawab dan Kepedulian

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *good university governance* dalam pengelolaan aset Universitas Muhammadiyah Sukabumi adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sampel penelitian ini Kabiro Umum, Kepegawaian dan Aset, kepala bagian pengelolaan aset, staf pengelolaan aset, dan pihak yang terkait dengan pengelolaan aset di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Populasi atau subjek penelitian semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Waktu dan tempat penelitian dari bulan Juli-Desember 2022 di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Instrumen penelitian dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Prosedur penelitian meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan metode *content analysis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Aset Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Pengelolaan aset Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) telah dilakukan secara transparansi dalam pengelolaan aset, perencanaan dan penganggaran yang baik, pengawasan dan pengendalian yang efektif, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan aset tersebut. Hal ini nampak dari Publikasi informasi yang dilakukan Universitas telah memberikan informasi yang transparan dan dapat diakses oleh publik mengenai aset universitas, seperti jumlah, jenis, dan lokasi aset, serta proses pengelolaan aset yang dilakukan. Sistem pengelolaan aset UMMI sudah mengembangkan sistem pengelolaan aset yang transparan, di mana informasi mengenai aset universitas dapat diakses oleh berbagai pihak yang terkait. Seperti nampak dalam gambar berikut:



Gambar 4.1 Sistem Informasi Manajemen Aset

Sumber: Kabiro Umum, Aset dan SDM UMMI (2022)

UMMI melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan standar yang ditentukan. Lembaga yang melakukan audit di UMMI dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang melakukan audit Aset tiap tahunnya.

Prinsip-Prinsip Good University Governance di Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Beberapa prinsip-prinsip *good university governance* yang diimplementasikan dalam pengelolaan aset Universitas Muhammadiyah Sukabumi diantaranya:

Transparansi: UMMI memberikan informasi yang transparan dan dapat diakses oleh publik mengenai aset universitas, seperti jumlah, jenis, dan lokasi aset, serta proses pengelolaan aset yang dilakukan. **Akuntabilitas:** Universitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset yang dilakukan dan harus dapat memberikan laporan yang jelas mengenai pengelolaan aset. **Efektif dan efisien:** Universitas harus melakukan pengelolaan aset dengan efektif dan efisien, yaitu dengan mengelola aset dengan biaya yang minimal dan meningkatkan nilai aset. **Keperluan publik:** Universitas harus mengelola aset dengan memperhatikan kepentingan publik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. **Partisipasi:** Universitas harus memberikan kesempatan bagi berbagai pihak yang terkait untuk memberikan masukan dan partisipasi dalam pengelolaan aset. **Etika:** Universitas harus mengutamakan etika dalam pengelolaan aset, yaitu dengan melakukan pengelolaan aset dengan cara yang baik dan benar.

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Implementasi Prinsip-Prinsip *Good University Governance*

Beberapa hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses implementasi prinsip-prinsip *good university governance* dalam pengelolaan aset universitas diantaranya:

1. Kurangnya komitmen dari pihak terkait: Pihak yang terkait dalam pengelolaan aset universitas mungkin kurang memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *good university governance* dalam pengelolaan aset.
2. Sistem pengelolaan aset yang kurang baik: Sistem pengelolaan aset yang kurang baik dapat menyebabkan kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip *good university governance* dalam pengelolaan aset.
3. Kurangnya sumber daya: Universitas mungkin kurang memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan prinsip-prinsip *good university governance* dalam pengelolaan aset, seperti sumber daya manusia yang kompeten dan dana yang cukup.
4. Kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat : Universitas mungkin kesulitan untuk menerapkan prinsip-prinsip *good university governance* karena ketidakadaan regulasi yang cukup ketat.
5. Kebutuhan akan sosialisasi dan pelatihan : Universitas mungkin kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip *good university governance* karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada pihak yang terkait dalam pengelolaan aset.
6. Kebutuhan akan pengawasan yang baik : Universitas mungkin kesulitan untuk

menerapkan prinsip-prinsip good university governance karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

SIMPULAN

Simpulan dari permasalahan ini adalah bahwa penerapan prinsip-prinsip *good university governance* dalam pengelolaan aset universitas merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan kepentingan publik. Namun, proses implementasi prinsip-prinsip tersebut mungkin menghadapi hambatan seperti kurangnya komitmen dari pihak terkait, sistem pengelolaan aset yang kurang baik, kurangnya sumber daya, dan kurangnya regulasi yang ketat. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dari pihak terkait, serta dukungan dari regulasi dan sumber daya yang cukup untuk mewujudkan penerapan prinsip-prinsip *good university governance* dalam pengelolaan aset universitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyani, P. (2018). Pendidikan karakter bagi generasi Z. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*. Jakarta, 23-25.
- Kharisma, B. (2014). Good governance sebagai suatu konsep dan mengapa penting dalam sektor publik dan swasta: Suatu pendekatan ekonomi kelembagaan. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 1-34.
- Megawati, V., Pratono, A. H., Mulya, T. W., & Prima, D. A. (2019). Kewirausahaan berbasis komunitas: Model bisnis untuk pengelolaan aset dan infrastruktur. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 3(2).
- Puspitarini, N. D. (2012). Peran satuan pengawasan intern dalam pencapaian good university governance pada perguruan tinggi berstatus PK-BLU. *Accounting Analysis Journal*, 1(2).
- Putra, A. I. P., & Roni, M. (2021). Good Governance Dalam Lingkungan Pendidikan Tinggi (Good University Governance). *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 11(2), 226-236.
- Remaja, I., & Gede, N. (2017, June). Penerapan Good Governance Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta Yang Berbasis Pelayanan. In *Dalam Prosiding Seminar: Revitalisasi Tata Kelola Perguruan Tinggi* (pp. 27-40).

- Rahayu, S., & Wahab, A. A. (2013). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good University Governance Terhadap Citra Serta Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing Perguruan Tinggi Negeri Pasca Perubahan Status Menjadi BHMN. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 17(1).
- Simamora, R., & Halim, A. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1).
- Shaula, I. T., Budirahayu, P., & Kristianti, I. (2022). Perlukah Tata Kelola Pengelolaan Dana Kemahasiswaan Dilakukan?. *Perspektif Akuntansi*, 5(3), 225-242.
- Supriyono, H., Noviandri, A. M., & Purnomo, Y. E. (2017). Penerapan Sistem Informasi Berbasis Komputer Untuk Pengelolaan Aset Bagi SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. *URECOL*, 59-70.
- Suriyani, S., & Ismail, Z. (2021). Pengaruh Satuan Pengawasan Internal (SPI) Dan Penerapan Internal Control Terhadap Pencapaian Good University Governance (GUG) Pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, 4(1), 34-42.
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7-21.
- Widyaningsih, A. MODEL PENILAIAN IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI.
- Wahyudin, A., Nurkhin, A., & Kiswanto, K. (2017). Hubungan good university governance terhadap kinerja manajemen keuangan perguruan tinggi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 21(1), 60-69.
- Yuliono, R. N., & Ngumar, S. (2019). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(6).
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 21-36.
- Majelis Pendidikan dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2020). *Inventarisasi Aset Tetap/ Barang Milik PTMA*. Yogyakarta.